



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 Januari 2021

Halaman: 9

Pendapatan Terjun Bebas

● PKL Malioboro Minta PSTKM Tidak Diperpanjang

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro meminta pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) sesuai dengan amanat pemerintah pusat yakni hanya dua pe-

kan. PKL menilai perpanjangan masa PSTKM hanya akan memperparah kondisi ekonomi.

Presidium Paguyuban Komunitas Kawasan Malioboro (PKKM), Sujarwo Putro, mengatakan, pelaku ekonomi rakyat yang terdampak bukan hanya lesehan, pasar sore dan Pasar Senthir yang terpaksa tidak dapat berak-

tivitas, tetapi juga menyasar ke pengemudi becak, andong, dan pedagang asongan serta PKL lainnya.

"Mereka harus menerima kenyataan, pendapatan terjun bebas," kata Sujarwo, Jumat (15/1).

● ke halaman 15

Kami harap pemerintah juga pikirkan soal ekonomi. Jangan hanya kesehatan saja, biar tidak timpang.

Pendapatan Terjun Bebas

● Sambungan Hal 9

Sutirah, satu-satunya pedagang lesehan malam di Malioboro yang masih buka sejak PSTKM menceritakan bahwa ia membuka lesehan atas permintaan empat pegawainya yang berasal dari NTT. Mereka meminta agar dirinya tetap buka supaya bisa mendapatkan biaya hidup dan tetap kuliah.

"Demi empat anak mahasiswa yang bekerja sebagai pegawai, saya masih bisa mempertahankan berjualan meskipun hanya satu sampai dua jam. Mereka yang meminta tetap buka agar bisa mendapat uang untuk biaya hidup. Mereka perlu makan, bayar kos dan lainnya," tambah Sutirah.

Sementara, Desio Hartonowati, Ketua Pedagang Lesehan Malioboro mengatakan, pihaknya total tidak bisa berjualan selama PSTKM ini. "Kami total sama sekali tidak berjualan selama PSTKM ini. Kami juga tidak bisa apa-apa karena kami cuman bertumpu dari jualan di Malioboro saja," jelasnya.

Pihaknya juga meminta pemberlakuan hanya sampai 25 Januari saja dan ti-

dak lagi diperpanjang. Sebab, kondisi ini memang sangat berat bagi pihaknya yang sangat menggantungkan hidup dengan berjualan.

"Kami harap pemerintah juga pikirkan soal ekonomi. Jangan hanya kesehatan saja, biar tidak timpang," ujarnya.

Pelanggaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DIY, Noviar Rahmad, menyebut masih banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan PSTKM. Meskipun tingkat kedisiplinan warga sudah cukup membaik.

"Kalau dibandingkan sebelum PSTKM memang sudah lebih disiplin, tapi kalau pelanggaran masih banyak," katanya saat dihubungi *Tribun Jogja*.

Lebih jauh, data yang dikumpulkan oleh Satpol PP, pelanggaran PSTKM didominasi oleh rumah makan atau resto, kemudian disusul toko ritel lainnya. Hingga hari ini, lonjakan pelanggaran tertinggi ada pada tanggal 14 Januari 2021. Kebanyakan dilakukan oleh rumah makan yang tidak menerapkan kapasitas maksimal 25 persen, dan buka lebih dari pukul 19.00 WIB.

Disusul oleh kawasan perkantoran yang belum menerapkan *Work From Home* (WFH). Selebihnya kawasan

Kota Yogyakarta masih paling banyak penyumbang pelanggaran yang diterapkan selama PSTKM.

Noviar menambahkan jika pelanggaran tersebut akan lebih ditekankan untuk kedepannya, dengan cara pemberian sanksi langsung. "Kita akan tindak dengan SP 1 dan penutupan operasi sementara 3x 24 jam," tandasnya.

Operasi yang dilakukan Satpol PP dibagi menjadi empat kategori, pertama operasi pagi dilakukan di depan Polda DIY, dengan sebutan operasi Aman Nusa, menyidik siapa saja yang melintas di daerah sana tidak mengenakan masker.

Kedua, regu pengawasan WFH untuk perkantoran, dengan deskripsi tugas memantau kepatuhan perkantoran terhadap kepatuhan WFH, dilakukan setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai 14.00 WIB. Ketiga, pengawasan protokol kesehatan di rumah makan yang dilakukan pukul 10.00 sampai 14.00 WIB.

Keempat, pengawasan jam tutup operasional tempat usaha di tiga wilayah, Bantul, Kota, dan Sleman. Biasanya Satpol PP melakukan operasi gabungan bersama dengan Polda, Korem, dan Brimob. (jst/taf)

Yogyakarta,

emerintah DIY
satpol PP
netral
braya
untuk diketahui

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005